

MASALAH KEBUTUHAN PARKIR

Oleh Bambang Ismanto Siswosoebroto

Dalam masalah pengaturan lalu lintas, masalah parkir bukan merupakan sesuatu yang baru. Terlebih di kawasan pusat kota, peningkatan kegiatan bisnis dan perkantoran telah membawa dampak pula terhadap masalah pengaturan parkir. Tempat parkir menjadi salah satu sarana yang sangat menunjang berlangsungnya berbagai kegiatan di kawasan pusat kota.

Pengelolaan perparkiran tentunya bertujuan menyediakan prasarana dan sarana parkir yang memadai sesuai kebutuhan, di samping juga dapat diarahkan untuk membatasi pergerakan kendaraan, khususnya kendaraan pribadi, di kawasan pusat kota. Dengan demikian, pengelolaan perparkiran diharapkan dapat menunjang ketertiban kegiatan di pusat kota serta kelancaran lalu lintas di kawasan bersangkutan.

Kebijaksanaan Parkir

Kebutuhan pergerakan kendaraan, khususnya kendaraan pribadi, di kawasan pusat kegiatan perkotaan pada jam-jam sibuk, nampaknya sudah melampaui kapasitas yang tersedia. Hasil pengamatan di Kota Jakarta, misalnya, volume lalu lintas di jalan-jalan utama yang menuju pusat kota didominasi kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi tersebut dinilai kurang efisien, karena terbukti 45% di antaranya hanya berisi satu orang dan 35% lainnya hanya berisi dua orang saja.

Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi membawa dampak negatif terhadap penggunaan angkutan umum, terlihat dari penurunan penumpangnya. Hal ini berakibat menambah beban finansial terhadap prasarana transportasi yang ada.

Di lain pihak, pelayanan angkutan umum yang masih kurang memadai juga mengakibatkan sebagian penduduk untuk beralih pada kendaraan pribadi. Hal ini juga mengingatkannya sifat kendaraan pribadi yang lebih praktis dan fleksibel. Akibatnya, volume lalu lintas pada jam-jam sibuk menjadi sangat padat.

Persoalan yang timbul ternyata bukan hanya dalam pengaturan arus lalu lintas yang padat, tetapi juga dalam penyediaan fasilitas parkir pada tempat-tempat akhir tujuan perjalanan penduduk. Kendaraan pribadi yang parkir sebagian dalam

jangka panjang (sehari), sehingga penyediaan tempat parkir perlu disesuaikan.

Sistem pengaturan lalu lintas dibutuhkan guna menyeimbangkan antara kebutuhan pergerakan dan penyediaan prasarananya. Sistem membayar jalan (road pricing), penggunaan batasan-batasan fisik (physical restraint), batasan parkir, pajak kendaraan dan batasan lainnya terhadap pemilikan kendaraan pribadi serta pengaturan tata guna tanah merupakan beberapa kemungkinan yang dapat diterapkan untuk mengatur sistem pergerakan kendaraan.

Dalam kaitan itu, maka pengelolaan parkir merupakan salah satu upaya pengaturan sistem pergerakan dalam hal memberikan fasilitas parkir serta pengawasannya terhadap pengguna kendaraan.

Sistem Parkir

Masalah parkir dihadapi para pengelola kota besar, kota menengah bahkan kota kecil, terutama yang memiliki volume lalu lintas tinggi. Perkembangan lalu lintas kota untuk masa mendatang nyaris sulit diperkirakan, hal ini paling tidak terlihat dari banyaknya peneliti yang tidak dapat begitu saja menerima angka-angka dari peneliti lainnya.

Sejauh ini pengelolaan dan penyediaan tempat parkir dilakukan pihak pemerintah daerah maupun swasta. Parkir dapat disediakan pada badan jalan

• Bambang Ismanto, adalah staf pengajar dan Kepala Laboratorium Rekayasa Jalan Raya Jurusan Teknik Sipil FTSP-ITB

yang kondisinya memungkinkan (tentunya oleh pemerintah) maupun di luar badan jalan (dapat oleh swasta). Pengadaan tempat parkir komersial, umumnya di luar badan jalan, dapat berupa semacam garasi umum, lapangan parkir terbuka maupun gedung parkir bertingkat.

Sistem perparkiran memiliki bentuk bervariasi, bergantung pada tingkat kecanggihan yang diinginkan. Di setiap negara tentunya hal ini berlainan. Hal ini berkaitan dengan biaya konstruksi, pemeliharannya serta tingkat kemajuan warga masyarakatnya.

Banyak badan pelaksana dan pengaturan perparkiran di negara maju menggunakan alat meteran parkir untuk pengontrolan parkir. Sistem lainnya menggunakan stiker parkir, kartu parkir, stiker khusus pengecualian, kartu parkir khusus penghuni dan lainnya. Kontrol parkir dapat pula dilakukan dengan pola pengecualian untuk hari tertentu (misalnya izin bagi kendaraan bernomor plat genap dan ganjil) sesuai karakteristik lalu lintas yang ada.

Di Indonesia, khususnya perkantoran dan pusat-pusat bisnis di kota-kota besar, sudah banyak diterapkan sistem striker yang biasanya untuk parkir di luar badan jalan. Sementara itu, parkir di badan jalan umumnya cenderung kurang terkontrol dan dikelola dengan baik, misalnya tanda bukti pembayaran retribusi parkir yang kerap tidak selalu diterima pemilik kendaraan yang parkir.

Suatu sistem parkir yang telah dikenal dan diterapkan di beberapa negara adalah sistem 'park and ride'. Penerapannya dapat dalam dua cara, yaitu:

- (1) Dekat tempat asal perjalanan (origin) dan memerlukan suatu sarana untuk transit atau moda angkutan umum jarak jauh;
- (2) dekat tempat akhir tujuan (destination) dan tidak memerlukan sarana transit jarak jauh, sehingga cukup jalan kaki.

Kedua cara tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika lahan parkir di pusat kota tidak tersedia, maka cara pertama lebih mudah diterapkan. Sebaliknya, jika lahan tempat parkir tersedia di pusat kota, maka cara kedua akan lebih efisien. Namun demikian tetap perlu pengkajian kedua sistem secara detil, mengingat pertimbangan segi ekonomi maupun politik yang melatarbelakngannya.

Perlu ditambahkan pula, bahwa mencari lahan yang luas untuk 'park and ride' di pinggiran kota akan lebih mudah (dan murah) dibanding di pusat kota. Di sisi lain, lahan di pusat kota akan lebih ekonomis jika diperuntukan bagi kegiatan produktif lainnya. Namun hal itu perlu ditunjang oleh sarana transit yang memadai.

Beberapa hasil pengamatan di kota-kota besar dunia menyebutkan, bahwa masyarakat atau penumpang cenderung untuk tidak pindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, jika sejumlah kondisi tidak dipenuhi, seperti:

- aksesibilitas yang tinggi di tempat asal maupun tujuan akhir,
- penghematan waktu perjalanan yang dilalui,
- tidak ada atau hanya sedikit berpindah moda,
- kualitas kendaraan umum yang memadai (jika perlu ber-AC),
- frekuensi pelayanan yang mencukupi.

Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi pemakaian kendaraan umum, meski masih terdapat faktor lain yang tak kalah penting, yakni ongkos perjalanan.

Metode Pembayaran

Sistem pembayaran parkir dapat digunakan pengelola perparkiran untuk mengontrol lama parkir suatu kendaraan serta menentukan besar sewa ruang parkir. Ketidakmampuan dalam menyediakan sistem yang seimbang berdasarkan kebutuhan dan kapasitas pelayanan, menyebabkan masalah perparkiran secara umum menggantungkan pengontrolannya pada kemampuan untuk membayar ruang parkir yang tersedia.

Metode pengontrolan parkir yang dapat digunakan untuk tujuan itu antara lain pembayaran langsung kepada petugas parkir, sistem koin untuk yang memakai alat meteran parkir, striker pembayaran, sistem kontrak dan lain sebagainya.

Adanya sistem dan persyaratan untuk pembayaran parkir secara tunai, membuka kemungkinan kontrol parkir menjadi curang dan mengarah pada tindak korupsi. Konsep parkir dengan tidak membayar tunai memiliki kelebihan yang secara administratif maupun finansial menguntungkan pemakai ruang parkir, mengurangi kebutuhan alat meteran parkir, meningkatkan efisiensi operasional badan pelaksana serta mengurangi biaya pemeliharaan.

Pelaksanaan, Organisasi dan Pengaturan

Keberhasilan pelaksanaan sistem parkir berkaitan erat dengan pengaturan lalu lintas. Keberhasilan teknik pelaksanaan sistem perparkiran bergantung pada:

- (1) Ada badan hukum yang pasti dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat serta sanggup mendefinisikan secara jelas tentang peraturan berikut sanksi bagi pelanggar hukum, dalam hal ini pelanggaran lalu lintas;
- (2) Ada persetujuan menyangkut pelaksanaan peraturan yang ditetapkan dengan badan pelaksana parkir, sehingga lalu lintas dapat dikontrol dengan baik serta menggunakan tenaga yang terandal sesuai persyaratan tugas pelaksanaan perparkiran;
- (3) Ada sistem administrasi yang mampu untuk menanganikan beban pekerjaan yang tercipta.

Segenap kebijaksanaan perparkiran seperti terurai di atas bersifat tidak terlalu kaku dan harus mencerminkan berbagai kebutuhan maupun tujuan. Tentunya diperlukan perubahan sesuai dengan keadaan yang senantiasa berkembang. Tanggung jawab pemantauan parkir harus ditangani suatu unit pengatur lalu lintas yang efektif.

Fungsi unit tersebut sepatutnya meliputi:

- memantau parkir untuk memeriksa kebijaksanaan operasional maupun biaya yang efektif,
- mereview kembali perlunya pengontrolan parkir,
- memonitor hasil penerimaan parkir dan biaya yang dikeluarkan,
- berhubungan dengan badan pelaksana,
- memperbaiki sistem perparkiran sesuai perkembangan situasi.

Unit pengatur lalu lintas melalui organisasinya dapat mengambil alih operasi harian untuk semua kontrol dalam perparkiran atau sebagai alternatif dapat menyewa kontraktor untuk mengelolanya. Semua itu bergantung pada skala dan volume pekerjaan bagi pengontrolan parkir.

Keberhasilan Parkir

Keberhasilan suatu organisasi badan pelaksana dan pengontrolan terhadap peraturan parkir yang dibuat bergantung pada beberapa hal, yaitu:

- (1) Tanggapan positif para pengambil keputusan yang menyadari, bahwa kontrol terhadap parkir memang dibutuhkan;
- (2) Tersedianya tenaga yang terandal serta peralatan yang cukup untuk melaksanakan peraturan dan pengontrolan perparkiran yang telah disepakati;
- (3) Ada kerja sama antara badan pelaksana dan pengelola perparkiran serta berbagai instansi terkait yang secara umum sependapat dengan kesepakatan awal;
- (4) Ada pengertian dari masyarakat umum tentang landasan dan pemikiran dasar "mengapa kontrol parkir" itu diperlukan, dimana pemberlakuan peraturan tersebut merupakan keuntungan jangka panjang.

Daftar Pustaka

- *Arterial Road System Development Study Survey, JICA, 1985.
- Eno Foundation for Transportation Inc., **Parking Garage Planning and Operation**, West Point - Connecticut, 1978.
- John Bridley, **Parking of Motor Vehicle**, second ed., Applied Science Publisher Ltd., London, 1978.